

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DENGAN SINGAPURA SEBELUM DITANDATANGANNYA KERJASAMA PARIWISATA PASKA DIBERLAKUKANNYA AEC

A. Perkembangan Pariwisata Indonesia dalam tahun 1994-2015

Studi Ilmu Hubungan Internasional adalah suatu ilmu yang memiliki cakupan yang sangat luas, seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Dalam bidang ekonomi itu sendiri mencakup beberapa hal salah satu diantaranya adalah industri pariwisata. Oleh karena itu pariwisata menjadi salah satu hal yang bisa dibahas dalam studi Ilmu Hubungan Internasional. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam usaha memperoleh devisa. Sektor pariwisata adalah komponen industri yang dianggap dapat membantu dalam memberikan pertumbuhan ekonomi. Di tengah kesulitan yang banyak dialami oleh berbagai negara, salah satu solusi dalam menstimulasi kesempatan kerja dan investasi adalah pariwisata. Kaum developmentalis berpendapat, pariwisata sebagai produk ekspor impor yang unik karena pariwisata memiliki potensi yang memungkinkan menjadi elemen penting bagi suatu strategi pembangunan negara – negara yang sedang berkembang. Lebih dari peluangnya sebagai sumber devisa. Industri pariwisata dipandang memiliki banyak elemen yang mendorong transformasi ekonomi negara – negara itu dari karakternya sebagai masyarakat pertanian yang tradisional menuju masyarakat modern internasional (Abimanyu, 1996)

Seperti yang kita ketahui Indonesia dan Singapura adalah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, dengan alasan tersebut maka Indonesia dan Singapura merupakan negara yang memiliki letak geografis yang berdekatan antar satu dengan yang lainnya. Secara politik, pada dasarnya hubungan Indonesia dan Singapura mengalami fluktuasi didasarkan isu permasalahan menyangkut kepentingan nasional masing-masing negara, namun demikian kedua negara memiliki fondasi dasar yang kuat untuk memperkuat dan

meningkatkan hubungan kedua negara yang lebih konstruktif, pragmatis dan strategis. Indonesia dan Singapura masing-masing memiliki peran yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara khususnya dalam efektivitas ASEAN, meskipun kedua negara ini memiliki luas territorial, jumlah populasi, serta pertumbuhan ekonomi yang sangat berbeda. Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama sosial budaya. Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang erat dan produktif mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan guna menunjang upaya pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia. (Indonesia, Kementrian Sekretariat Negara Republik, 2009)

Dalam upaya peningkatan ekonomi suatu negara, baik Indonesia maupun Singapura melakukan berbagai macam bentuk kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Pariwisata merupakan salah satu aspek yang dominan bagi kedua negara tersebut untuk meningkatkan perekonomian negaranya masing-masing. Pariwisata merupakan suatu industri yang unik, dimana tidak adanya batasan kepemilikan individu untuk melakukan kegiatan wisata, serta tidak terbatasnya sumber pariwisata yang berbeda dengan industri-industri lain seperti pada umumnya. Dari keseluruhan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, Singapura merupakan penyumbang jumlah wisatawan terbesar bagi Indonesia dengan 1.519.430 wisatawan Singapura yang mengunjungi Indonesia. Sedangkan bagi Singapura, Singapura juga merupakan destinasi wisata populer bagi rakyat Indonesia. Wisatawan asing yang datang ke Singapura paling banyak berasal dari Indonesia, yaitu sebesar 2,7 juta orang (Singapore Tourism Board, 2016). Dengan keuntungan letak geografis yang saling berdekatan, Indonesia dan Singapura merupakan partner yang sangat kuat dalam industri pariwisata. Indonesia dan Singapura merupakan penyumbang jumlah wisatawan mancanegara yang tertinggi bagi masing-masing negara baik bagi Singapura, ataupun Indonesia.

Melihat keterikatan kedua negara tersebut pada sektor pariwisata di masa kini, perlu ditinjau di masa lalu bahwa Indonesia dan Singapura pernah melakukan kerjasama pada bidang pariwisata pada era kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1994 sebelum kedua negara tersebut kembali melakukan perjanjian sektor pariwisata pada tahun 2016. Dengan perjanjian tersebut, baik Indonesia dan Singapura mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan dalam pemasukan wisatawan mancanegara dari perjanjian tersebut. Perjanjian ini dilangsungkan untuk menambah, meningkatkan, dan mengembangkan destinasi wisata Indonesia dan Singapura untuk menambah pemasukan negara dari sektor industri pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh pada perjanjian kerjasama pariwisata di tahun 1994, kedua negara menyetujui tentang kerjasama di bidang promosi dan

pengembangan pariwisata antara kedua belah pihak yang terkait, yaitu Singapura dan Indonesia. Dalam perjanjian tersebut dituliskan bahwa Indonesia dan Singapura menyetujui beberapa poin kerjasama yang disepakati dan wajib dijalankan selama kurun waktu sepuluh tahun.

Berdasarkan perjanjian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik singapura mengenai kerjasama di bidang promosi dan pengembangan pariwisata telah disepakati :

1. Tujuan wisata

- a. Secara bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan wisata baru di Indonesia untuk dikembangkan dan dipromosikan, sesuai dengan kelayakan komersial dan keberadaan penanam modal sektor swasta.
- b. Tujuan-tujuan wisata baru tersebut dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, Yogyakarta/Solo, Ujung Pandang, Manado, Lombok, dan berbagai tempat di Sumatra Barat.

2. Promosi dan pemasaran bersama

- a. Kedua negara akan bekerjasama melalui masing-masing organisasi kepariwisataan nasionalnya untuk mempromosikan arus turis yang menguntungkan kedua belah pihak, ke Singapura dan tujuan-tujuan wisata sebagaimana yang ditetapkan. Kerjasama tersebut dapat meliputi promosi perjalanan wisata dari Singapura ke tujuan-tujuan tersebut tadi
- b. Program-program pemasaran dan promosi bersama tersebut akan mencakup, namun tidak terbatas pada advertensi, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan internasional yang sesuai serta produksi dari bahan-bahan promosi.

3. Pengembangan obyek wisata dan prasarana

- a. Kedua negara akan bekerjasama, atas dasar saling menguntungkan, untuk mempromosikan dan memperlancar masuknya investasi internasional di bidang pengembangan tempat-tempat peristirahatan di tujuan-tujuan wisata baru yang ditetapkan.
- b. Kedua negara akan bekerjasama untuk mempromosikan dan memperlancar masuknya investasi dalam fasilitas prasarana untuk menunjang proyek-proyek kepariwisataan yang dikembangkan bersama.
- c. Yang dimaksud dengan prasarana ini mencakup, namun tidak terbatas pada, fasilitas bandar udara, telekomunikasi, utilitas, dan transportasi.
- d. Proyek-proyek yang telah disetujui, akan mendapat perlakuan yang terbaik sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, untuk dapat mendorong investasi.

4. Pengembangan bersama pelayanan udara

- a. Dengan tetap memperhatikan sistem transportasi udara masing-masing negara, Para Pihak sepakat untuk mengembangkan hubungan udara di antara kedua negara, termasuk pelayanan penerbangan langsung dan penerbangan carter antara Singapura dan tujuan-tujuan wisata yang ditetapkan, selain itu pelayanan penerbangan ke pintu-pintu masuk yang sudah lebih bettembang, yang dihubungkan dengan tujuan-tujuan wisata baru, merupakan prasyarat bagi keberhasilan proyek-proyek wisata.
- b. Kedua negara akan bekerjasama melalui instansi-instansi pengelola penerbangan dan perusahaan-perusahaan penerbangan dalam mengembangkan dan mengoperasikan pelayanan udara ke tujuan-tujuan wisata baru yang

ditetapkan, serta pintu-pintu masuk penerbangan yang telah berkembang di Indonesia.

5. Pertukaran tenaga penasihat, tenaga ahli, dan teknisi

Kedua negara sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pertukaran tenaga penasihat, tenaga ahli, teknisi, dan pelatihan tenaga, dalam rangka pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

6. Pertukaran informasi

- a. Kedua negara akan mendorong tukar menukar pengalaman dalam berbagai hal yang berkaitan dengan organisasi, manajemen, dan operasi bisnis pariwisata di masing-masing negara.
- b. Pertukaran publikasi dan informasi lain antara kedua negara yang berkaitan dengan proyek-proyek pengembangan obyek wisata beserta prasarana penunjangnya, sepanjang memungkinkan, akan didorong (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 1994) .

Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia dan Singapura sama-sama diuntungkan dan kepentingan masing-masing negara terpenuhi dengan baik. Buktinya dua puluh tahun setelah penanda tanganan kerjasama tersebut baik Indonesia maupun Singapura, mendapatkan perkembangan pariwisata yang sangat drastis di tahun 2015. Baik dari segi jumlah wisatawan yang masuk atau jumlah destinasi wisata favorit bagi turis asing maupun turis lokal. Terwujudnya kepentingan tersebut tidak terlepas dari andil perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak pada tahun 1994 silam. Dapat dilihat dari Indonesia sendiri pada tahun 2015 tercatat jumlah wisatawan asing yang masuk ke dalam negeri sejumlah 10,4 juta meningkat 10% dari tahun 2014 sebesar 9,4 juta. Sedangkan wisatawan Singapura yang datang ke Indonesia pada tahun 2015 sebesar 1,6 juta meningkat dari tahun 2014 sebesar 3,5%. Dengan melihat hasil tersebut, kedua negara dapat dipastikan menjadi partner yang berpotensi untuk saling meningkatkan jumlah pemasukan dalam negeri, serta

mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal (Kementrian Pariwisata Indonesia, 2016).

B. Kondisi Pariwisata Indonesia

Pariwisata merupakan aktivitas penting dalam hubungan internasional. Di tahun 2012 tercatat lebih dari 1 Milyar aktivitas pariwisata diseluruh dunia. Kini pengembangan pariwisata menjadi salah satu strategi ekonomi dari pemerintah negara maju maupun negara berkembang. Perancis adalah negara dengan jumlah inbound tourism terbesar didunia sejak tahun 1992 hingga 2012. Bahkan, ditahun 1997 hingga kini jumlah wisatawan mancanegara melebihi jumlah penduduk lokalnya. Terbukti Perancis merupakan contoh pengembangan pariwisata tersukses didunia. Kemampuan Perancis untuk mempertahankan performa pariwisatanya disebabkan oleh keterlibatan pemerintah yang begitu besar dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah mampu memenuhi fungsi-fungsi dalam bisnis pariwisata dalam lingkup domestik maupun internasional, sehingga Perancis mampu beradaptasi dengan berbagai tuntutan dari pasar.

Dalam perencanaan, Perancis menggunakan konsep *sustainable tourism development* untuk meminimalisir dampak negatif dari pengembangan pariwisata. Konsep ini juga menjaga keseimbangan alam dan memberikan keadilan bagi masyarakat lokal. Konsep *sustainable tourism* yang diterapkan oleh Perancis justru mendorong pengembangan pariwisata seperti munculnya tujuan wisata, aktivitas dan bisnis baru akibat implementasi konsep STD. Pemerintah juga menjalankan fungsi koordinasi, pembuatan undangundang, dan berperan sebagai investor dalam pengembangan pariwisata, sehingga pengembangannya bersifat jangka panjang serta merata hampir diseluruh wilayah. Investasi diberikan bagi pembangunan infastruktur pendukung pariwisata. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai stimulant bagi pihak swasta, sehingga hubungan sektor publik dan pihak swasta dapat berjalan dengan dinamis dan harmonis. Pemerintah berperan aktif dalam mengembangkan citra positif pariwisata Perancis dalam kancah internasional melalui promosi, pemasaran, branding, juga diplomasi (Salsabila, 2016).

Sedangkan dalam pariwisata Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 bab 1 pasal 1 bagian ketentuan umum menjelaskan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009).

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia serius untuk memaksimalkan kekayaan alam Indonesia untuk kemudian dijadikan sebagai industri yang dapat menyokong perekonomian Negara Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga mengharapkan partisipasi para pengusaha dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya untuk terjun langsung dalam memajukan pariwisata Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata ini menjadi hal yang positif sebagai pemantau akan transparansi serta menimbulkan interaksi antara masyarakat dengan Pemerintah Indonesia secara langsung, sebagaimana negara yang demokratis. Pada kenyataannya pariwisata Indonesia memang memiliki pesona dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik pada umumnya dan wisatawan mancanegara. Pada khususnya, Keistimewaan alam Indonesia pada setiap sudutnya selalu menjadi hal yang dirindukan, belum lagi aneka ragam budaya di dalamnya yang menambah harmonisasi keindahan akan sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu Indonesia tidak pernah sepi oleh para pelancong mancanegara yang ingin secara langsung menikmati pariwisata di Indonesia. Oleh sebabnya pariwisata Indonesia memiliki peran penting terhadap negara, salah satunya bidang ekonomi. Pariwisata di Indonesia yang merupakan salah satu industri sekaligus pembantu perekonomian Indonesia dan merupakan program ekonomi kreatif negara. Kemampuan sektor pariwisata di Indonesia dalam menghasilkan devisa telah memosisikan pariwisata sebagai komoditi ekspor yang penting di samping migas. Penting bagi industri pariwisata Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) karena hal ini akan memicu lebih banyak pendapatan devisa (karena setiap turis asing menghabiskan rata-rata antara 1.100 dollar AS sampai 1.200 dollar AS per kunjungan) dan juga menyediakan kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia (berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di negara ini mencapai 5,81% di Februari 2015). Diperkirakan bahwa hampir 9% dari total angkatan kerja nasional dipekerjakan di sektor pariwisata.

Saat ini, sektor pariwisata Indonesia berkontribusi untuk kira-kira 4% dari total perekonomian. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan angka ini dua kali lipat menjadi 8% dari PDB, sebuah target yang ambisius (mungkin terlalu ambisius) yang mengimplikasikan bahwa dalam waktu 4 tahun mendatang, jumlah pengunjung perlu ditingkatkan dua kali lipat menjadi kira-kira 20 juta. Dalam rangka mencapai target ini, Pemerintah akan berfokus pada memperbaiki infrastruktur Indonesia (termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi), akses, kesehatan & kebersihan dan juga meningkatkan kampanye promosi online (marketing) di luar negeri (Indonesia Investment, 2016).

Di bawah ini disajikan data kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Table 1 Kunjungan Wisatawan Asing di Indonesia 2007-2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wisatawan Asing (dalam juta)	5.51	6.23	6.32	7.00	7.65	8.04	8.80	9.44	9.73

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kedatangan turis asing di Indonesia telah bertumbuh secara stabil dari tahun 2007 sampai 2015. Performa yang solid ini didukung oleh pengurangan insiden teroris di Indonesia. Meskipun sedikit, di Indonesia ada kelompok Muslim radikal yang percaya tidak hanya Islam harus menjadi satu-satunya panduan hidup namun juga bersedia menggunakan tindakan-tindakan ekstrim (kekerasan) untuk mengubah dan menghancurkan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Serangkaian serangan teroris yang ditujukan untuk menyerang para pendatang dari negara-negara Barat (Bom Bali 2002/2005) dan Bom Ritz-Carlton/Marriott 2009 di Jakarta) berhasil untuk menghambat kedatangan turis asing karena banyak turis asing dari negara-negara Barat tidak mau menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan wisata di bulan-bulan setelah insiden-insiden kekerasan tersebut (namun dalam setahun jumlah turis pulih kembali). Bom Ritz-Carlton/Marriott 2009 menjelaskan mengapa pertumbuhan kedatangan turis di 2009 terbatas (lihat tabel di atas).

Setelah tahun 2009, belum ada lagi serangan teroris yang ditujukan terhadap para pendatang dari negara-negara Barat. Kesuksesan ini adalah karena usaha pasukan khusus anti terorisme negara ini (Densus 88), yang disponsori oleh

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan dilatih oleh CIA, FBI dan Secret Service AS. Setelah 2009, kelompok-kelompok radikal mulai beroperasi dalam jaringan yang lebih kecil (yang lebih sulit untuk dilacak) dan serangan-serangan ditujukan pada simbol-simbol negara Indonesia (seperti polisi), bukan pada simbol Dunia Barat. Ini mungkin adalah reaksi dari banyak penangkapan yang dilakukan Densus 88 di beberapa tahun terakhir (Setianto, 2016).

Dalam Travel and Tourism Competitiveness Report dari World Economic Forum, yang mengukur sejumlah faktor dan kebijakan yang memungkinkan perkembangan berkelanjutan dari sektor travel dan wisata, yang pada gilirannya, berkontribusi pada pembangunan dan daya kompetitif negara ini, Indonesia melompat dari peringkat 70 di tahun 2013 menjadi peringkat 50 di tahun 2015, sebuah kemajuan yang mengagumkan. Lompatan ini disebabkan oleh pertumbuhan cepat dari kedatangan turis asing ke Indonesia, prioritas nasional untuk industri pariwisata dan investasi infrastruktur (contohnya jaringan telepon selular kini mencapai sebagian besar wilayah di negara ini, dan transportasi udara telah meluas). Laporan ini menyatakan bahwa keuntungan daya saing Indonesia adalah harga yang kompetitif, kekayaan sumberdaya alam (biodiversitas), dan adanya sejumlah lokasi warisan budaya. Meskipun demikian, laporan itu juga menyatakan bahwa Indonesia tidak memberikan cukup penekanan pada keberlanjutan lingkungan hidup (mengakibatkan penggundulan hutang dan membayakan spesies-spesies langka, sementara hanya sedikit dari limbah air yang diolah). Laporan ini juga menyebutkan kekuatiran-

kekuatiran tentang keselamatan dan keamanan, terutama kerugian bisnis karena terorisme (World Economic Forum, 2015).

Kekhawatiran lain adalah karena Indonesia tertinggal di belakang dibandingkan Singapura (peringkat 11), Malaysia (peringkat 25) dan Thailand (peringkat 35) dalam pemeringkatan Travel & Tourism Competitiveness Report 2015. Kurangnya infrastruktur yang layak di Indonesia adalah masalah yang berkelanjutan, bukan hanya karena hal ini sangat meningkatkan biaya-biaya logistik sehingga membuat iklim investasi kurang menarik namun juga mengurangi kelancaran perjalanan untuk pariwisata. Infrastruktur di Bali luar biasa dan di Jakarta cukup layak (kecuali untuk kemacetan lalu lintas yang sangat besar) namun di luar Bali dan Jakarta kebanyakan infrastruktur di negara ini kurang layak, terutama di wilayah Timur Indonesia karena kurangnya bandara, pelabuhan, jalan, dan hotel. Kurangnya konektivitas di dalam dan antar pulau berarti ada sejumlah besar wilayah di Indonesia dengan potensi pariwisata yang tidak bisa didatangi dengan mudah. Selain infrastruktur, pendidikan juga menjadi halangan. Meskipun di Pulau Bali dan hotel-hotel mewah di Jakarta kebanyakan penduduk asli yang bekerja di sektor pariwisata cukup fasih berbahasa Inggris (dan bahkan bahasa-bahasa asing lainnya), di wilayah-wilayah yang lebih terpencil penduduk asli kesulitan untuk berkomunikasi dengan para turis. Oleh karena itu, fokus pada mempelajari Bahasa Inggris akan membantu mengatasi keadaan ini. Halangan bahasa ini adalah alasan mengapa sejumlah warga Singapura lebih memilih Malaysia ketimbang Indonesia sebagai

tempat tujuan wisata mereka. Kebanyakan turis asing yang datang ke Indonesia berasal dari Singapura, diikuti oleh Malaysia dan Australia (Indonesia Investment, 2016).

C. SEJARAH PEMBENTUKAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti *ASEAN Industrial Projects Plan* (1976), *Preferential Trading Arrangement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading arrangement* (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan (KOMPASIANA, 2014).

Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* sekaligus

menandai dicanangkannya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi. KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan sektor prioritas yang ke-12. KTT ke-10 ASEAN di Vientiane tahun 2004 antara lain menyepakati *Vientiane Action Program* (VAP) yang merupakan panduan untuk mendukung implementasi pencapaian AEC di tahun 2020.

ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (blueprint) untuk menindaklanjuti pembentukan AEC dengan mengidentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC

pada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali Concord II dan dengan target-target dan timelines yang jelas serta pre-agreed flexibility untuk mengakomodir kepentingan negara-negara anggota ASEAN. KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati "Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015". Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun "Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)". Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :

1. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM);
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of equitable economic development) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI); dan
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network).

Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui priority actions yang pencapaiannya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan score card. Disamping itu, diperlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan

(capacity building) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di masing-masing negara. Pada KTT ASEAN Ke-13 di Singapura, bulan Nopember 2007, telah disepakati Blueprint for the ASEAN Economic Community (AEC Blueprint) yang akan digunakan sebagai peta kebijakan (roadmap) guna mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. AEC Blueprint juga akan mendukung ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang makin berkurang. Sebagai upaya untuk memfasilitasi perdagangan di tingkat nasional dan ASEAN sebagaimana tertuang dalam AEC Blueprint 2015, Indonesia telah melakukan peluncuran National Single Window (NSW) dalam kerangka ASEAN Single Window (ASW) pada tanggal 17 Desember 2007. Menurut rencana ASW akan diimplementasikan pada tahun 2009. Indonesia dalam KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh tahun 2012, ditunjuk sebagai motor penggerak dalam mengintegrasikan kekuatan Asia Tenggara di dunia global. Bersama-sama dengan Singapura dan Thailand, Indonesia berada di baris terdepan dalam mengimplementasikan konsep-konsep yang telah disepakati. Keadaan ini diperkuat dengan optimisme Menteri Perdagangan RI Gita Wiryawan yang menyebutkan bahwa ASEAN Economic Community (AEC) ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan pendapatan per kapita. Dengan konsep

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar dalam perekonomian global bersaing dengan blok-blok integrasi lainnya di luar Asia. Tentunya peluang ini harus dimaksimalkan oleh seluruh negara ASEAN dengan persiapan di semua sektor. Tujuan utama dari 10 negara ini adalah tingkat perekonomian yang merata di samping mendapatkan kemudahan akses ekonomi regional. Melihat keadaan memang tidak selalu seperti yang diharapkan (Kemenkeu, 2015).